

RENJA 2019

RENCANA KERJA
Organisasi Perangkat Daerah
DINAS KOPERASI ,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Kabupaten Bone

Jl. KALIMANTANNO. 42 TELP. 0481- 21034

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019. Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan diawali penjarangan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan rencana kerja (RENJA) Pemerintah Daerah. Rancangan rencana kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja dilingkungan Kabupaten Bone dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Tahun 2019.

Buku Rancangan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Watampone, 2019
**Kepala Dinas Koperasi, UKM
Kabupaten Bone**

H. A. YUSUF, S.IP, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. LatarBelakang	1	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2	
1.3. Maksud danTujuan.....	4	
1.4 Sistematika Penulisan.....	4	
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU		
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu(2017) dan Capaian Renstra OPD.....	6	
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13	
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD.....	22	
2.4. Review Terhadap RKPD	24	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD		35
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	35	
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD.....	36	
3.3 Program Dan Kegiatan.....	40	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD		42
BAB V PENUTUP		50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	8
Tabel 2.4. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	21
Tabel 2.5. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	25
Tabel 2.6. Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi	35
Tabel 3.2. Identifikasi Kebijakan Dalam RPJMD	36
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Tahun 2019	38
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bone Tahun 2019	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari rancangan Rencana Strategis Periode Tahun 2018—2023. Rencana Kerja PD (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Renja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis.

Rencana kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan realistis. Oleh karena itu dalam rencana Kerja ini akan mencantumkan Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone 2019. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan musrenbang RKPD Kabupaten Bone tahun 2017 yang akan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018-2023 sehingga akan memudahkan didalam mengukur target kinerja tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idil dari Rencana Kerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Bone diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bone.
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Bone Nomor: 77 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.
17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.

18. Peraturan Bupati Bone Tanggal Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.
19. Surat Edaran Bupati Bone Tanggal 12 Maret Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daaerah dan RPJM Daerah dan Renstra PD, terdiri dari 5 BAB dan beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

” SISTEMATIKA PENULISAN ”

BAB I Pendahuluan berisi : 1.1) Latar Belakang, berisi tentang : 1.2) Dasar Hukum Penyusunan, 1.3) Maksud dan Tujuan, 1.4) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang 2.1) Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD, 2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan, 2.5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD, 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja PD yaitu Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra PD. 3.3) Program dan Kegiatan,

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (2017) dan Capaian Renstra PD

Perihal Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu masih melekat pada satuan Dinas Koperasi, dan UMKM Kabupaten Bone sebelum adanya dinas tahun berjalan saat ini yaitu satuan dinas baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskop dan UMKM Tahun 2017 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2017 ini terfokus hanya pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan / kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja (Lampiran).

C. Evaluasi Program Tahun 2017

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.304.861.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.257.863.870,- atau 96,00 %. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra PD

No	Program dan Kegiatan	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% DANA
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah	349.060.000,-	338.691.070,-	97,03 %
	Kegiatan Pengelolaan Penggunaan Dan Pemerintah Bagi Usaha Mikro	53.600.000,-	53.320.000,-	99,48 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	186.360.000,-	178.015.000,-	95,52%,
	Kegiatan Pendataan UKM	74.900.000,-	74.895.000,-	99,99 %
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Ekonomi Lokal	34.200.000,-	32.461.070,-	94,92 %
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	955.801.900,-	919.172.800,-	96,17 %
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	300.300.000,-	270.220.000,-	89,98 %
	Kegiatan Sosialisasi Prinsip Pemahaman Koperasi	57.681.000,-	57.115.000,-	99,02%
	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	121.670.000,-	109.674.000,-	90,14 %
	Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	45.078.000,-	40.195.000,-	89,17 %
	Kegiatan Pembinaan dan pemantauan Administrasi Pengelola Pasar Tradisional	49.800.000,-	46.340.000,-	93,05 %
	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	84.966.000,-	77.746.000,-	91,50 %
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	33.600.000,-	31.815.000,-	94,69 %
	Kegiatan Pwlatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi pengurus Pengelola USP	58.304.400,-	56.644.400,-	97,15 %,
	Kegiatan Pembinaan dan penilaian KSP/USP	47.025.000,-	44.923.400,-	95,53 %
	Kegiatan Pembinaan Pemantauan Adminitrasi Keuangan KSP/USP	199.700.000,-	184.500.000,-	92,39 %
	JUMLAH	1.304.861.900,	1.257.863.870	96,00 %

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2017 adalah tercapai baik dengan capaian 96,00%. Mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Langkah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra PD.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada Tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

lembar.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Wajib												
1	15	Bidang Koperasi dan UKM											
1	15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM selama satu Tahun Anggaran	467,000,000	273,430,800	468,329,000	429,969,500	91.81	618,667,300	440,689,200.00	94	
1	15	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	20,000,000	25,762,400	54,385,000	42,782,800	78.67	42,385,000	36,976,733	184.88
1	15	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	150,000,000	112,997,000	150,510,000	132,206,000	87.84	181,839,200	142,347,400	94.90
1	15	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Tingkat Ketersediaan Komponen AC, Komputer dan Printer sesuai Rencana Kebutuhan selama	17,000,000	2,785,000	4,096,000	1,825,000	44.56	4,096,300	2,902,100	17.07

1	15	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tingkat Ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	20,000,000	183,871,000	127,986,300	119,141,400	93.09	237,020,300	180,010,900	900.05
1	15	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Realisasi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	46,000,000	38,347,700	42,000,000	21,048,000	50.11	97,700,000	52,365,233	113.84
1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur pembina koperasi dan UKM	100,000,000	19,930,000	34,000,000	29,550,000	86.91	100,000,000	49,826,666.67	50
1	15	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat keikutsertaan aparat pembina koperasi dan UKM dalam kegiatan Bimbingan Teknis serta Diklat Struktural	100,000,000	19,930,000	34,000,000	29,550,000	86.91	100,000,000	49,826,667	49.83
1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	75,000,000	23,089,000	48,300,000	41,380,000	85.67	48,300,000	37,589,666.67	50
1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	75,000,000	23,089,000	48,300,000	41,380,000	85.67	48,300,000	37,589,667	50.12
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro	150,000,000	33,100,000	-	-	#DIV/0!	-	11,033,333.33	7

1	15	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan 3 kecamatan pertahun anggaran	150,000,000	33,100,000	-	-	#DIV/0!	-	11,033,333	7.36
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro	354,500,000	238,083,300	349,060,000	338,691,070	97.03	323,560,000	300,111,456.67	85
1	15	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Realisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha bagi penerima bantuan wirausahabaru	53,600,000	-	53,600,000	53,320,000	99.48	53,600,000	35,640,000	66.49
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan promosi Produk UKM (Anyaman, Kerajina, Makanan/minuman dan obat-obatan) selama satu tahun anggaran	150,000,000	176,744,300	186,360,000	178,015,000	95.52	189,060,000	181,273,100	120.85
1	15	17	10	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan usaha dan pemberian bantuan peralatan usaha	70,000,000	20,839,000	34,200,000	32,461,070	94.92	-	17,766,690	25.38
1	15	17	13	Pendataan UMKM	Persentase Realisasi penyusunan database UKM Kab. Bone selama satu tahun anggaran	80,900,000	40,500,000	74,900,000	74,895,000	99.99	80,900,000	65,431,667	80.88
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan pelaksanaan program peningkatan kulaitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran	919,795,000	528,389,700	1,053,785,700	971,550,800	92.20	817,102,400	772,347,633.33	84
1	15	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase Realisasi pelaksanaan penyuluhan koperasi bagi wanita usia produktif secara bertahap di 6 kecamatan pertahun	70,000,000	235,585,000	300,300,000	270,220,000	89.98	103,390,000	203,065,000	290.09

01	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Persentase Realisasi pelaksanaan sosialisasi prinsip prinsip koperasi terhadap gerakan koperasi pada tahun berkenaan	85,000,000	34,720,000	57,681,000	57,115,000	99.02	63,569,400	51,801,467	60.94
1	15	18	05	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Persentase Realisasi Jumlah koperasi berprestasi	195,000,000	41,630,000	121,670,000	109,674,000	90.14	121,670,000	90,991,333	46.66
1	15	18	06	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Persentase Realisasi jumlah gerakan koperasi yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	95,000,000	28,832,000	45,078,000	40,195,000	89.17	45,078,000	38,035,000	40.04
1	15	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase peningkatan kualitas pelaporan perkembangan koperasi / USP	30,000,000	31,345,200	33,600,000	31,815,000	94.69	38,600,000	33,920,067	113.07
1	15	18	11	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Persentase jumlah koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan koperasi	58,304,000	58,339,500	58,304,400	56,644,400	97.15	58,304,000	57,762,633	99.07
1	15	18	12	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase jumlah koperasi sehat kab. Bone	52,025,000	18,795,000	24,500,000	24,500,000	100.00	52,025,000	31,773,333	61.07
1	15	18	13	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Persentase jumlah fasilitasi bantuan perkuatan usaha / peralatan bagi koperasi sehat	199,700,000	17,148,000	199,700,000	184,500,000	92.39	199,700,000	133,782,667	66.99
1	15	18	17	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Persentase realisasi jumlah binaan koperasi pengelola pasar tradisional	49,800,000	19,630,000	127,986,300	119,141,400	93.09	49,800,000	62,857,133	126.22
1	15	18	18	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Persentase jumlah koperasi yang terlatih manajemen pengelolaan Koperasi /KUD	84,966,000	42,365,000	84,966,000	77,746,000	91.50	84,966,000	68,359,000	80.45
1	15	19		Fasilitas pengembangan Indikator Teknologi dan Bisnis	Cakupan pelaksanaan sistem teknologi informasi koperasi dan UKM	43,100,000	24,500,000	35,100,000	26,400,000	75.21	43,100,000	31,333,333.33	73
1	15	19	01	Pengembangan Teknologi Informasi Koperasi dan UKM	Persentase Realisasi pengembangan jaringan teknologi dan informasi koperasi dan UKM Kab. Bone	43,100,000	24,500,000	35,100,000	26,400,000	75.21	43,100,000	31,333,333	72.70

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

” Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone terdapat susunan organisasi yang terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris dengan 2 sub bagian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dengan 3 seksi
- d. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan 3 seksi
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan 3 seksi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

TUGAS :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

FUNGSI

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan program dan anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian.

- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset.
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TUGAS

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan.
- f. Membuat rencana kerja tahunan.
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas.
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala.
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan.
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN TUGAS

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi

FUNGSI

- a. Penganalisaan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Penganalisaan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Penganalisaan berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Penganalisaan berkas pembubaran koperasi.
- e. Perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam.
- f. Perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Penganalisaan data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

3.1 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN TUGAS

Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Menganalisis dokumen izin pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam.
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

3.2 KEPALA SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN TUGAS

Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terkait tugasnya.

3.3 KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILIAIAN KESEHATAN

TUGAS

Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
- b. Melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- d. Memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi.
- e. Memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

FUNGSI

- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.1 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
- c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.3 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

FUNGSI

- a. Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- c. Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)

- e. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- f. Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

5.1 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK)
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

5.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- b. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

5.3 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- c. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Dinas Koperasi Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi perlu ditingkatkan lagi mengingat gedung kantor belum memadai.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 setelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran PD dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 85-100 = Sangat baik/Sangat berhasil
- 70-<85 = Baik/Berhasil
- 55-<70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil
- <55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi Aktif dan koperasi sehat	-	Koperasi Aktif	51,13 Persen	30,39 Persen	32,44 Persen	34,50 Persen	58,96 Persen (283 / 480)	-	32,445 Persen	34,50 Persen	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	Usaha Mikro	65,6 Persen	99,91 Persen	99,86 Persen	99,86 Persen	87,8 Persen (9628 / 9933)	-	99,86 Persen	99,86 Persen	

Dari hasil kinerja pada tahun 2017 jika dimasukkan pada scoring tolok ukur capaian kinerja akan diperoleh sebagai berikut:

No.	Sasaran RPJMD	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang dan bertambahnya Jumlah wirausahabaru	Berhasil
2	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	Berhasil

Dari Tabel 2.4 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Bidang Koperasi dan UKM dapat mencapai realisasi 100% dari target kinerja ini berarti baik / berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, yaitu :

a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

- Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
- Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
- Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
- Masih adanya Asosiasi yang belum dimanfaatkan oleh UMKM. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Masih banyak Koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat

b. Aspek Sumber Pembiayaan

- o Pada umumnya Koperasi dan UKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
- o Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- o Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
- o Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.

- c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi)
- o Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk.
 - o Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
 - o Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar. Produk unggulan lokal belum berdaya saing.
 - o Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.
- d. Aspek SDM dan Pelaku UKM/Koperasi
- o Kurangnya jiwa wirausaha pelaku Koperasi dan Usaha Mikro
 - o Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang benar.
 - o Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi.
- e. Aspek Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro
- o Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.
 - o Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Ritel koperasi. Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal.
 - o Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan UMKM.
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain - lain.
- o Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya.
 - o Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi.
- g. Pengelolaan Program Strategis (Koperasi wanita)
- Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan.
- Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi sebagai berikut :
1. Mengembangkan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.
 2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
 3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
5. Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Bone serta sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Tabel 2.5. (T-C.31.)
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM selama satu Tahun Anggaran		515,492,275	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM selama satu Tahun Anggaran		515,492,275	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	48 Rekening	42,385,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	48 Rekening	42,385,000	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	1 Dokumen	190,931,160	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas	1 Dokumen	190,931,160	

								Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran			
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan Komponen AC, Komputer dan Printer sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	20 unit	4,301,115	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan Komponen AC, Komputer dan Printer sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	20 unit	4,301,115	
4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar sebanyak 10 jenis terbitan dan Majalah 6 jenis terbitan) selama satu tahun anggaran	7 Jenis	7,875,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar sebanyak 10 jenis terbitan dan Majalah 6 jenis terbitan) selama satu tahun anggaran	7 Jenis	7,875,000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Dalam daerah dan luar daerah	Tingkat keikutsertaan Aparat Dinas Koperasi Dan UKM dalam kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (minimal 5 Tk. Nasional, 10 Tk. Propinsi, 12 Tk. Kabupaten) selama satu tahun anggaran	1 Dokumen	200,000,000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Dalam daerah dan luar daerah	Tingkat keikutsertaan Aparat Dinas Koperasi Dan UKM dalam kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (minimal 5 Tk. Nasional, 10 Tk. Propinsi, 12 Tk. Kabupaten) selama satu tahun anggaran	1 Dokumen	200,000,000	
6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	1 Paket	70,000,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	1 Paket	70,000,000	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pembina sesuai perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur pada tahun anggaran berkenaan		442,402,500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pembina sesuai perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur		442,402,500	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pengadaan Perlengkapan / Operasional kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	1 Paket	62,002,500	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pengadaan Perlengkapan / Operasional kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	1 Paket	62,002,500	
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	1 Paket	92,400,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	1 Paket	92,400,000	
9	Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pengadaan mebeleur kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	1 Paket	40,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pengadaan mebeleur kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	1 Paket	40,000,000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Unit	150,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Unit	150,000,000	

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	10 Unit	98,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	10 Unit	98,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur pembina koperasi dan UKM		105,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur pembina koperasi dan UKM		105,000,000
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam daerah dan luar daerah	Tingkat keikutsertaan aparat pembina koperasi dan UKM dalam kegiatan Bimbingan Teknis serta Diklat Struktural	9 orang	105,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam daerah dan luar daerah	Tingkat keikutsertaan aparat pembina koperasi dan UKM dalam kegiatan Bimbingan Teknis serta Diklat Struktural	9 orang	105,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran		50,715,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran		50,715,000
13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam daerah dan luar daerah	Persentase Realisasi penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	13 Dokumen	50,715,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam daerah dan luar daerah	Persentase Realisasi penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM	13 Dokumen	50,715,000

	Mikro Kecil Menengah					Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		mikro			
17	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha bagi penerima bantuan wirausahabaru	120 UMKM	56,280,000	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha bagi penerima bantuan wirausahabaru	120 UMKM	56,280,000	
18	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan promosi Produk UKM (Anyaman, Kerajina, Makanan/minuman dan obat-obatan) selama satu tahun anggaran	1 Dokumen	198,513,000	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan promosi Produk UKM (Anyaman, Kerajina, Makanan/minuman dan obat-obatan) selama satu tahun anggaran	1 Dokumen	198,513,000	
19	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Kecamatan Cenrana	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan usaha dan pemberian bantuan peralatan usaha	1 Dokumen	50,400,000	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Kecamatan Cenrana	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan usaha dan pemberian bantuan peralatan usaha	1 Dokumen	50,400,000	
20	Pendataan UMKM	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi penyusunan database UKM Kab. Bone selama satu tahun anggaran	1800 UMKM	84,945,000	Pendataan UMKM	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi penyusunan database UKM Kab. Bone selama satu tahun anggaran	1800 UMKM	84,945,000	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Cakupan pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran		1,049,398,020	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Cakupan pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran		1,049,398,020	

21	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Kecamatan	Persentase Realisasi pelaksanaan penyuluhan koperasi bagi wanita usia produktif secara bertahap di 6 kecamatan pertahun	120 Wanita	300,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Kecamatan	Persentase Realisasi pelaksanaan penyuluhan koperasi bagi wanita usia produktif secara bertahap di 6 kecamatan pertahun	120 Wanita	300,000,000
22	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pelaksanaan sosialisasi prinsip prinsip koperasi terhadap gerakan koperasi pada tahun berkenaan	1 Dokumen	66,747,870	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi pelaksanaan sosialisasi prinsip prinsip koperasi terhadap gerakan koperasi pada tahun berkenaan	1 Dokumen	66,747,870
23	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Beberapa Kecamatan	Persentase Realisasi Jumlah koperasi berprestasi	1 Dokumen	127,753,500	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Beberapa Kecamatan	Persentase Realisasi Jumlah koperasi berprestasi	1 Dokumen	127,753,500
24	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Beberapa Kecamatan	Persentase Realisasi jumlah gerakan koperasi yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	10 Koperasi	47,331,900	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Beberapa Kecamatan	Persentase Realisasi jumlah gerakan koperasi yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	10 Koperasi	47,331,900
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan	Persentase peningkatan kualitas pelaporan perkembangan koperasi / USP	35 Koperasi	40,530,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan	Persentase peningkatan kualitas pelaporan perkembangan koperasi / USP	35 Koperasi	40,530,000
26	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase jumlah koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan koperasi	25 Orang	61,219,200	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase jumlah koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan koperasi	25 Orang	61,219,200
27	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Beberapa Kecamatan	Persentase jumlah koperasi sehat kab. Bone	20 Koperasi	54,626,250	Pembinaan Dan Penilaian	Beberapa Kecamatan	Persentase jumlah koperasi sehat kab. Bone	20 Koperasi	54,626,250

						Kesehatan KSP/USP					
28	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Beberapa Kecamatan	Persentasi jumlah fasilitas bantuan perkuatan usaha / peralatan bagi koperasi sehat	10 Koperasi	209,685,000	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Beberapa Kecamatan	Persentasi jumlah fasilitasi bantuan perkuatan usaha / peralatan bagi koperasi sehat	10 Koperasi	209,685,000	
29	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Beberapa Kecamatan	Persentase realisasi jumlah binaan koperasi pengelola pasar tradisional	11 Koperasi	52,290,000	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Beberapa Kecamatan	Persentase realisasi jumlah binaan koperasi pengelola pasar tradisional	11 Koperasi	52,290,000	
30	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase jumlah koperasi yang terlatih manajemen pengelolaan Koperasi /KUD	70 Koperasi	89,214,300	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KU D	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase jumlah koperasi yang terlatih manajemen pengelolaan Koperasi /KUD	70 Koperasi	89,214,300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan koperasi, pelaku Usaha Mikro, masyarakat serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para stakeholders.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja dimulai dari Sub. Bagian Program dan Keuangan yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bone melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas. RKA kemudian dikirim ke pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelakanya (berdasarkan) Urgensi dan (ketersediaan dana) di akomodasikan dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD tahun 2019-2023 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 (T-C.32)Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Tanete Riattang, Kec. Kajuara dan Kec. Lamuru	Terlaksana Pelatihan Tiga Kali Di Tiga Kecamatan	150,000,000.00	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dan UU No.20/2008 tentang UMKM. RPJPN Menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Nasional		
1	Peningkatan Kualitas sumber daya manusia	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan	Renstra 2018 -2023	
3	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	Renstra 2018 -2023	
4	Penguatan kelembagaan usaha	Renstra 2018 -2023	
5	Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha	Renstra 2018 -2023	
B.	Provinsi		
1.	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses kepada sumber daya produktif	Renstra 2018 -2023	
3	Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
4	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
5	Penguatan kelembagaan Koperasi	Renstra 2018 -2023	

Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sesuai Visi dan Misi Rencana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMD
KABUPATEN BONE

NO.	KEBIJAKAN	SUMBER KET
1.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usah Kecil Menengah	RPJMD
2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	RPJMD
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	RPJMD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro “
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Serta tiga Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro.
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk Tahun 2019 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD dapat dilihat pada matriks (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sumber data	Penanggung jawab
	Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan koperasi yang berkualitas	1. Jumlah Koperasi berprestasi 2. Pesentase Koperasi aktif 3. Pesentase koperasi sehat 4. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi	1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi 2. Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkantoran 3. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 4. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Pengelola USP 7. Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP 8. Pembinaan Pemantauan Adminstrasi Keuangan KSP/USP 9. Kegiatan Pembinaan dan Pemnataan Adminitrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional 10. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Data keragaan Koperasi (ODS)	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

		Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil 2. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil 3. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5. Program Pengembangan Siste Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro 2. Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil dan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 	Data Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
--	--	---	---	---	--	---	-------------------------------	---------------------------------

3.3 Program Dan Kegiatan

Dengan melihat Lampiran Tabel 4.1 (T.C.33) dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 telah disesuaikan dengan anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 4. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan
 5. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
 6. Pelaksanaan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Peralatan Gdung Kantor
 3. Pengadaan Mebeleur
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
 2. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
6. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 3. Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
 4. Pendataan UMKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi
 2. Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkantoran
 3. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 4. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 6. Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Pengelola USP
 7. Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
 8. Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP
 9. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional
 10. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Administrasi Perkantoran; tolok ukur dan hasil program ini adalah Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; tolok ukur dan hasil program ini adalah cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; tolok ukur dan hasil program adalah persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; tolok ukur dan hasil program ini adalah cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran.
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum; tolok ukur dan hasil program ini adalah cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran.
6. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif; tolok ukur dan hasil program ini adalah % Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro.
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; tolok ukur dan hasil program ini adalah % Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, menengah.
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi; tolok ukur dan hasil program ini adalah % peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah :Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program /Kegiat an	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	15	01									
1	15	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran			515,492,275	APBD / DAU		537,611,525
1	15	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	48 Rekening	42,385,000	APBD / DAU		44,504,250

1	15	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	1 Dokumen	190,931,160	APBD / DAU	1 Dokumen	191,931,160
1	15	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Tingkat Ketersediaan Komponen AC, Komputer dan Printer sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	20 unit	4,301,115	APBD / DAU	20 unit	6,301,115
1	15	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar sebanyak 10 jenis terbitan dan Majalah 6 jenis terbitan) selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	7 Jenis	7,875,000	APBD / DAU	7 Jenis	9,875,000
1	15	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Tingkat keikutsertaan Aparat Dinas Koperasi Dan UKM dalam kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (minimal 5 Tk. Nasional, 10 Tk. Propinsi, 12 Tk. Kabupaten) selama satu tahun anggaran	Dalam daerah dan luar daerah	1 Dokumen	200,000,000	APBD / DAU	1 Dokumen	210,000,000
1	15	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	1 Paket	70,000,000	APBD / DAU	1 Paket	75,000,000

1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aaratur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran			442,402,500	APBD / DAU		459,402,500
1	15	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Realisasi pengadaan Perlengkapan / Operasional kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	Kecamatan Tanete Riattang	1 Paket	62,002,500	APBD / DAU		64,002,500
1	15	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Realisasi pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	Kecamatan Tanete Riattang	1 Paket	92,400,000	APBD / DAU		94,400,000
1	15	02	10	Pengadaan Mebeleur	Persentase Realisasi pengadaan mebeleur kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berkenaan	Kecamatan Tanete Riattang	1 Paket	40,000,000	APBD / DAU		43,000,000
1	15	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tingkat Ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	Unit	150,000,000	APBD / DAU		160,000,000
1	15	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Realisasi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	10 Unit	98,000,000	APBD / DAU		98,000,000

1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat			105,000,000	APBD / DAU			107,000
1	15	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat keikutsertaan aparat pembina koperasi san UKM dalam kegiatan Bimbingan Teknis serta Diklat Struktural	Dalam daerah dan luar daerah	9 orang	105,000,000	APBD / DAU		9 orang	107,000
1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran			50,715,000	APBD / DAU			51,715,000
1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran	Dalam daerah dan luar daerah	13 Dokumen	50,715,000	APBD / DAU		13 Dokumen	51,715,000
1	15	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran			49,500,000	APBD / DAU			49,500,000
1	15	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja-P, RKA,DPA,DPPA tersedia tepat waktu	Dalam Daerah dan Luar Daerah	6 Dokumen	31,000,000	APBD / DAU		6 Dokumen	31,000,000

1	15	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Data Umum Koperasi dan Usaha Mikro	Kec. Tanete Riattang	1 tahun	18,500,000	APBD / DAU	1 tahun	18,500,000
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro			150,000,000	APBD / DAU		160,000,000
1	15	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan 3 kecamatan pertahun anggaran	Tanete Riattang, Kajuara, Lamuru	3 kali kegiatan	150,000,000	APBD / DAU	3 kali kegiatan	160,000,000
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro			1,439,536,020	APBD / DAU		1,469,536,020
1	15	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Realisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha bagi penerima bantuan wirausahabaru	Kecamatan Tanete Riattang	120 UMKM	56,280,000	APBD / DAU	120 UMKM	59,280,000
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan promosi Produk UKM (Anyaman, Kerajina, Makanan/minuman dan obat-obatan) selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	1 Dokumen	198,513,000	APBD / DAU	1 Dokumen	199,513,000
1	15	17	10	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan usaha dan pemberian bantuan peralatan usaha	Kecamatan Cenrana	1 Dokumen	50,400,000	APBD / DAU	1 Dokumen	53,400,000

1	15	17	13	Pendataan UMKM	Persentase Realisasi penyusunan database UKM Kab. Bone selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang	1800 UMKM	84,945,000	APBD / DAU		1800 UMKM	86,945,000
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan pelaksanaan program peningkatan kulaitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran			1,049,398,020	APBD / DAU			1,070,398,020
1	15	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase Realisasi pelaksanaan penyuluhan koperasi bagi wanita usia produktif secara bertahap di 6 kecamatan pertahun	Kecamatan	120 Wanita	300,000,000	APBD / DAU		120 Wanita	310,000,000
01	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Persentase Realisasi pelaksanaan sosialisasi prinsip prinsip koperasi terhadap gerakan koperasi pada tahun berkenaan	Kecamatan Tanete Riattang	1 Dokumen	66,747,870	APBD / DAU		1 Dokumen	68,747,870
1	15	18	05	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Persentase Realisasi Jumlah koperasi berprestasi	Beberapa Kecamatan	1 Dokumen	127,753,500	APBD / DAU		1 Dokumen	128,753,500
1	15	18	06	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Persentase Realisasi jumlah gerakan koperasi yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	Beberapa Kecamatan	10 Koperasi	47,331,900	APBD / DAU		10 Koperasi	48,331,900
1	15	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase peningkatan kualitas pelaporan perkembangan koperasi / USP	Kecamatan	35 Koperasi	40,530,000	APBD / DAU		35 Koperasi	41,530,000
1	15	18	11	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Persentase jumlah koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan koperasi	Kecamatan Tanete Riattang	25 Orang	61,219,200	APBD / DAU		25 Orang	62,219,200
1	15	18	12	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentasi jumlah koperasi sehat kab. Bone	Beberapa Kecamatan	20 Koperasi	54,626,250	APBD / DAU		20 Koperasi	56,626,250

1	15	18	13	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Persentase jumlah fasilitasi bantuan perkuatan usaha / peralatan bagi koperasi sehat	Beberapa Kecamatan	10 Koperasi	209,685,000	APBD / DAU		10 Koperasi	210,685,000
1	15	18	17	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Persentase realisasi jumlah binaan koperasi pengelola pasar tradisional	Beberapa Kecamatan	11 Koperasi	52,290,000	APBD / DAU		11 Koperasi	53,290,000
1	15	18	18	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Persentase jumlah koperasi yang terlatih manajemen pengelolaan Koperasi /KUD	Kecamatan Tanete Riattang	70 Koperasi	89,214,300	APBD / DAU		70 Koperasi	90,214,300

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone tahun 2019 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bone. Gambaran program/kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Program/kegiatan yang direncanakan selama satu tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalamnya.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Demikian Rencana Kerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat.